



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# DKI Batalkan Lelang Proyek ERP

Anggaran Rp 40,9 Miliar Dicoret

**Gambir, Warta Kota**

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencoret pengadaan lelang proyek jalan berbayar atau *electronic road pricing* (ERP) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Pembatalan proyek itu dilakukan guna mengikuti pendapat hukum atau legal opinion yang dikeluarkan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Agustus 2019.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, ada 10 kegiatan dalam proyek itu yang dibatalkan DKI Jakarta. Kata dia, ada yang harus dikaji ulang di seluruh dokumen pengadaan itu berdasarkan usulan Kejagung.

"Sekarang kami sedang mengundang beberapa narasumber untuk didiskusikan lagi mengenai seluruh dokumen," kata Syafrin saat dihubungi pada Selasa (10/9). Syafrin mengatakan, secepatnya dokumen tersebut bisa selesai dikaji ulang.

Dengan demikian, proyek tersebut bisa masuk ke dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam menentukan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

"Kami harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan kami usulkan kembali untuk ditampung dalam kegiatan tahun 2020," ujar Syafrin.

Meski bakal diajukan kembali ke dalam anggaran 2020, namun Syafrin belum bisa

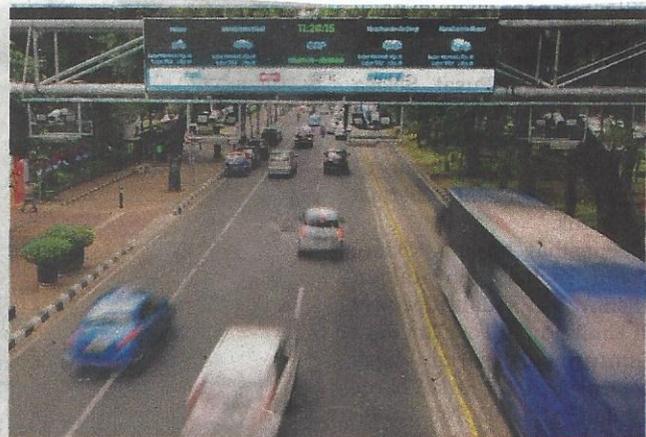


**Sekarang kami sedang mengundang beberapa narasumber untuk didiskusikan lagi mengenai seluruh dokumen.**

**Syafrin Liputo**  
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta

membeberkan nilai pengadaan proyek. Alasannya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih mengkaji dokumen tersebut untuk mematangkan kegiatan ini.

Namun bila dilihat dari situs [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id), total anggaran di Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik mencapai Rp 40,9 miliar pada



Warta Kota/Adhy Kelana

**UJI COBA** — Perangkat ERP telah dipasang di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat untuk uji coba beberapa bulan lalu.

2018. Anggaran itu dikurangkan untuk berbagai kegiatan teknis dalam pelaksanaan ERP.

Sebelumnya, lelang ERP dilakukan tanpa mencantumkan satu teknologi tertentu pada 22 Juli 2018, sehingga Kejagung menyarankan agar proses lelang kembali diulang.

Panitia lelang di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jalan Berbayar Elektronik (JBE) telah mendapatkan tiga

perusahaan peserta lelang yang memasuki tahap uji coba teknis dari *Proof of Concept* (POC) masing-masing penyedia.

Di antaranya Q-Free, Kapsch dan Bali tower. Perusahaan asal Norwegia Q-free dan Kapsch dari Swedia pernah menguji coba perangkat ERP di ruas Jalan Sudirman dan Kuningan, Jakarta Selatan pada 2018 lalu. **(faf)**

## Padukan Kebijakan dengan Teknologi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, Kejagung telah menyampaikan pendapat hukumnya mengenai pembatalan lelang tersebut melalui surat resmi. Dari surat itu, Pemprov DKI Jakarta kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Aplikasi Telematika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Kami koordinasi dengan mereka menyangkut penggunaan teknologi yang paling tepat untuk mengatur pajak kemacetan melalui ERP," kata Anies.

Menurut Anies, di era yang serba digital ini

pemerintah perlu memadukan segala kebijakan dengan teknologi. Aplikasi ini diharapkan bisa tersemat di ponsel pintar pengendara, sehingga mengubah paradigma awal tentang kebijakan ERP yang memakai gerbang atau gawang untuk dilewati.

"Sekarang pemanfaatan satelit dari BTS (*base transmission station*) dan teknologi-teknologi baru seperti itu sudah banyak. Jangan sampai Pemprov DKI Jakarta mengadopsi konsep ERP yang masih menggunakan teknologi lama, yang kita kenal sebagai gawang," ujarnya. **(faf)**